

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adi, Koesno. 2014. *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*. Malang: Setara Press.
- Alatas, Syed Hussein. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: RAS Penebar.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, M. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Chandera, dkk. 2004. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch, atas dukungan The Asia Foundation dan USAID.
- Danil, Elwi. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1973. *Doktrin-Doktrin Krimonologi: Teori-Teori Tentang Sebab-Musabab Kejahatan dan Mashab-Mashabnya*. Bandung: Alumni.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fischer, Robert J & Gion Green. 1992. *Introduction to Security* sixth Ed. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Hukum Acara Pidana. Modul 1*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Jakarta: KPK.
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maroni. 2013. *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nurdjana, I.G.M. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Pangaribuan, Luhut M. P. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1990. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prastyo). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodipoetro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegak Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media
- Social Development. 2011. *Integrated Social Crime Prevention Strategy*. Department Social Development Republik of South Africa.
- Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- 1982. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemantri, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. & Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradinya Paramita.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surachmin & Suhandi Cahaya. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.

- Wijaya, Firman. 2008. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Penaku.
- Wisnubroto, Aloysius & G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2. Jurnal

- Annisa, Nur Fitra. 2017. Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*. Vol. 5(3). hlm. 161-164
- Basuki, A. 2013. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana. *Perspektif*, Vol. 18(1). hlm. 56-63
- Chandra, Helmi. 2022. Gerakan dan Tantangan Pusat Studi Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta, *Jurnal Jurisprudential*. Vol. 5(1). hlm. 24-34.
- Enggarani, Nuria Siswi. 2018. Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*. Vol. 3(2). hlm. 82-90
- Erdianto. 2010. Makelar Kasus/Mafia Hukum. Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*. Vol. 1(1). hlm. 31-44
- Fauzan, Muhammad. 2010. Penerapan *Access Control* Sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional di Ladang Minyak Duri. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 7(1). Mei. hlm. 151-173
- Gubali, Agustina. 2013. Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia. *Lex Crimen*. Vol. 2(4). hlm. 53-62
- Gunakaya, Widiada. 2010. Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan Hukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif). *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 23(2). hlm. 167-197
- Hartono. 2019. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Vol. 5(1). hlm. 77-98
- Haydar & Idris. 2023. Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan. *Dian Widya: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 7(2). hlm. 15-32.
- Junaidi, dkk. 2022. Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1(10). hlm. 714-720
- Kholid, Abdul. 2017. Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (*Judicial Corruption*) di Indonesia. *Jurnal Justisi Hukum*. Vol. 2(1). hlm. 26-44
- Maaroef, Yusran. 2021. Kebijakan Pengembangan Peradilan Dalam Mengatasi Masalah Mafia Pengadilan. *Justitia*. Vol. 15(2). hlm. 1-6

- Nasution, Bahder Johan. 2015. Eksistensi Lembaga Peradilan Dalam Negara Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. *Al-Risalah*. Vol. 15(2). hlm. 199-211
- Joshua Paskah Nugraha, Wahyuni & Kusmiarto, Prospek Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Mengoptimalkan Keamanan Dokumen Pertanahan Elektronik: Sebuah Tinjauan Literatur Secara Sistematis, *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, Vol.2(1), 2024, hlm. 66-84.
- Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17(33). hlm. 81-95
- Rismawati, Shinta Dewi. 2015. Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 13(1). hlm. 129-130
- Rumadan, Ismail. 2017. Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 6(1). hlm. 69-87
- Samsuduha, A. & Ibrahim. 2018. Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan. *Legalitas*. Vol. 10(2). hlm. 247-274
- Santoso, Topo. 2013. Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13(3). hlm. 402-414
- Sari, Ratna Kumala & Raja Agung Kusuma Arcaropeboka. 2023. Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 2(1). hlm. 1-7
- Syamsudin, M. 2010. Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17(3). hlm. 406-429
- Wantu, Fence M. 2023. Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *MIMBAR HUKUM*, Vol. 25(2). hlm. 205-218
- Widodo, J. P. 2012. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12(1). hlm. 108-120
- Winarta, Frans Hendra. 2002. Sejarah dan Modus Operandi Mafia Peradilan di Indonesia. *Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. 2(2). hlm. 50-62
- Wiriadinata, Wahyu. 2010. Masalah Mafia Peradilan Dan Korupsi di Indonesia. *Syar Hukum* Vol. 12(1). hal. 49-61

3. Skripsi

- Mahar, Akbar. 2010. Analisis Modus Operandi Mafia Peradilan Dalam Memengaruhi Proses Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Ditinjau Dari Segi Kode Etik

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby.

5. Website Internet

Budi, M. 2025. Ahli di Sidang Ronald Tannur: Hakim Tak Boleh Bertemu Pihak Berperkara. detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7817991/ahli-di-sidang-ronald-tannur-hakim-tak-boleh-bertemu-pihak-berperkara>, diakses pada 12 Maret 2025

Ernes, Yogi. 16 April 2025. Data ICW: Hakim Terima Siap hingga Rp107 Miliar Sejak 2011. <https://news.detik.com/berita/d-7871806/data-icw-29-hakim-terima-suap-hingga-rp-107-miliar-sejak-2011?>, diakses pada 2 Mei 2025.

Fadhil, Haris. 23 Oktober 2024. Kontroversi Vonis Bebas Ronald Tannur, Kini Hakim Ditangkap Kejagung. <https://news.detik.com/berita/d-7603179/kontroversi-vonis-bebas-ronald-tannur-kini-hakim-ditangkap-kejagung>, diakses pada 13 Maret 2025

KBBI Daring. “mafia peradilan”. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 20 Maret 2025.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 14 Januari 2025. Penahanan Tersangka RS Dalam Perkara Suap Gratifikasi Penanganan Perkara Ronald Tannur. <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3008/read>, diakses pada 20 April 2025.

-----, 17 Desember 2024. Penuntut Umum Melimpahkan Berkas Perkara 3 Tiga Terdakwa Perkara Suap dan atau Gratifikasi Ronald Tannur ke PN Tipikor Jakarta Pusat. <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/2520/read>, diakses pada 20 April 2025.

-----, 9 Januari 2025. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II Terhadap Tersangka 2 Tersangka Gratifikasi Ronald Tannur. <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/2873/read>, diakses pada 20 April 2025.

National Crime Prime Council (NPCP). Crime Prevention History and Theory Modul 2006. <https://www.slideshare.net/slideshow/crime-prevention-history-and-theory-presentation/562633>, diakses pada 15 Februari 2025

Puspita, Sherly. 2017. Kisah Korban Salah Tangkap yang disiksa Polisi. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/22/08572121/kisah.korban.salah.tangkap.yang.disiksa.polisi>, diakses pada 30 November 2024

- Rahmani, N. P. 2025. Kejagung Ungkap Kronologi Aliran Dana di Kasus Suap Ronald Tannur. ANTARA News, <https://www.antaraneews.com/berita/4573098/kejagung-ungkap-kronologi-aliran-dana-di-kasus-suap-ronald-tannur>, diakses pada 25 Februari 2025
- Transparency International Indonesia. 2024. Corruption Perceptions Index 2024. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2024/>, diakses pada 8 Mei 2025
- Victoria. 2025. JPU Minta Hakim Tolak Keberatan Zarof Ricar di Kasus Suap-Gratifikasi. ANTARA News, <https://www.antaraneews.com/berita/4662205/jpu-minta-hakim-tolak-keberatan-zarof-ricar-di-kasus-suap-gratifikasi>, diakses pada 24 Februari 2025

